

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Indonesia adalah kaum yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, namun juga memiliki kesamaan dalam berbagai bentuk diskriminasi, ketidak-adilan, pengabaian yang dialami. Untuk dapat memperjuangkan ketidakadilan yang dialami, kaum perempuan harus bersatu untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang seringkali terabaikan karena berbagai hambatan, terutama hambatan yang berasal dari kuatnya nilai ideologi patriarki (Saptandari 2018). Terbukti dalam sejarah bahwa perempuan bangkit pada 1928 dimana pada saat itu setelah terjadinya kongres perempuan Indonesia yang pada masa itu dianggap era kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Karena pada saat itu pertama kali muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki, dimana pada saat itu mereka dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya. Namun, secara konkrit kegiatan perempuan dalam kegiatan ekonomi baru dimunculkan dalam kongres perempuan indonesia tahun 1941 di Semarang, yang salah satu keputusannya adalah membentuk empat badan pekerja, yakni: (1) pemberantasan buta huruf, (2) penyelidikan masalah tenaga kerja perempuan, (3) masalah perkawinan hukum Islam, (4) memperbaiki ekonomi perempuan indonesia. Menarik untuk

menyimak permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dari masa ke masa. Masalah yang dirasakan berat bagi kaum perempuan dari masa ke masa ada yang sama, terus menerus dijumpai, tetapi ada pula yang tidak sama. beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai paling berat dirasakan kaum perempuan adalah: (a) pendidikan untuk perempuan, (b) penghapusan perkawinan anak dan permaduan, (c) menentang pelacuran, (d) memberi kesempatan luas bagi perempuan untuk tampil di muka umum, (e) pendidikan seks, (f) upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, (g) perbakina penghidupan petani, (h) pendidikan untuk perempuan tani. Bila kita cermati permasalahan yang teridentifikasi pada awal abad XX dengan apa yang terjadi di awal abad XXI ini, ternyata beberapa hal masih merupakan isu sentral yang belum banyak mengalami perubahan.

Langkah pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui jalur pengorganisasian dan jalur pendidikan. Dengan mempelajari gerakan perempuan yang ada, kita akan dapat mempunyai gambaran yang relatif utuh tentang kiprah perempuan dalam memperjuangkan dirinya, dan mampu lebih berkembang dan bersaing di kehidupan nyata. Kesetaraan gender membuat beberapa organisasi penting dalam pemberdayaan pada perempuan karena bukan kaum laki-laki saja yang harus berperan aktif tetapi perempuan juga harus berperan aktif, kaum perempuan juga memiliki hak yang sepadan dengan laki-laki, untuk mewujudkan generasi perempuan yang sadar akan potensinya untuk berperan aktif setara dengan kaum laki-laki dalam memajukan agama dan

masyarakat khususnya dengan objek kaum perempuan adalah bentuk proses pemberdayaan potensi-potensi kaum perempuan yang terkubur akibat sistem budaya feodal-patriarkhis dan paham keagamaan yang jumud pada waktu itu. Maka dari itu organisasi Aisyiyah dan NU (Nadhatul ulama) memfokuskan kepada kaum perempuan, untuk tetap berkontribusi dan meningkatkan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Aisyiyah dan Muslimat NU merupakan organisasi yang besar yang banyak membantu masyarakat dalam dunia ekonomi dan pendidikan, dimana organisasi Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah yang besar, organisasi Aisyiyah Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan. Menjelang usia seabad, Aisyiyah yang merupakan komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Gerakan Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

Adanya Covid-19 yang sangat berbahaya dan merupakan penyakit yang mampu mematikan manusia maupun hewan. Covid-19 ini sangat mudah terinfeksi melalui benda mati, saling bersentuhan, bahkan melalui tetesan kecil

seperti batuk berdahak yang bisa menjangkit ke orang lain. Inilah sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjaga diri sendiri agar terjauh dari Covid-19. Adapun data DIY yang terkena Covid-19 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Covid 19 di DIY

| Data Terbaru Covid 19 di DIY | 29 September 2020 | 15 Oktober 2020 | 13 Mei 2021 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| PDP | 684 | 660 | 708 |
| Covide 19 Positif | 2607 | 3216 | 4565 |
| Pasien Meninggal | 67 | 85 | 208 |
| Pasien Sembuh | 1856 | 2471 | 3012 |

Sumber Data: <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>

Dari data tersebut bahwa pada tanggal 29 September 2020 provinsi DIY yang positif terkena Covid-19 sebanyak 2607, PDP 684, pasien yang meninggal 67, dan pasien yang sembuh 1856, sedangkan pada tanggal 15 Oktober 2020 terkena Covid-19 naik sebanyak 3216, PDP 660, pasien meninggal 85 dan pasien sembuh 2471, pada tanggal 26 Oktober 2020 yang terkena Covid-19 sangat drastis mengalami kenaikan hingga 4565, PDP 708, pasien yang meninggal 208 dan pasien yang sembuh 3012. Dari data diatas bahwa provinsi DIY sangat cepat mengalami kenaikan yang terkena Covid-19 setiap bulannya .

Maka dari itu setiap organisasi-organisasi atau gerakan ikut dalam mengurangi adanya Covid-19. Dengan adanya Covid-19 perekonomian keluarga drastis menurun, karena diberlakukannya aktivitas dirumah, tidak adanya kegiatan diluar rumah. Salah satu gerakan yang ikut dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan Covid-19

ini, yaitu pada gerakan Aisyiyah yang sangat peduli pada masyarakat dan banyak membantu masyarakat dan organisasi yang berperan penting dalam menghadapi Covid-19 termasuk juga Muslimat NU (Nadhatul Ulama). Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk fokus dalam meneliti tentang membandingkan pemberdayaan organisasi perempuan menghadapi pandemic Covid-19 dalam studi kasus Organisasi Aisyiyah dan Muslimat NU.

Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kaum perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang kurang mampu. Entah karena alasan kesehatan seperti karantina mandiri atau enggan mempertaruhkan diri terkena virus jika ke luar rumah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau dirumahkan oleh perusahaan. Ketika permasalahan anak, ekonomi, hingga permasalahan secara psikis tertekan karena di rumah terus bisa memunculkan depresi, baik itu yang tingkatannya, rendah, sedang, atau tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan organisasi Islam pada masa pandemic Covid-19 dengan judul : “Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Dan Muslimat Nu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah dan Muslimat pada masa pandemic Covid-19 di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah dan Muslimat pada masa pandemic Covid-19 di DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengantar ilmu pemerintahan dan Memberikan informasi di bidang Aisyiyah dan dibidang NU mengenai Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi DIY: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Dan Muslimat Nu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Aisyiyah dan NU setempat, pemerintah setempat dan bahan informasi bagi pemerintahan DIY dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan pemerintah, khususnya tentang pelayanan kepada masyarakat dimasa-masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung dalam penelitian ini:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian, Peneliti, dan Tahun Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----------|--|---|
| 1. | Analisis Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan Transformasional Dan Kesiapan Untuk Berubah Terhadap Kinerja Karyawan Wanita Di Masa Pandemi COVID-19 (Teguh Yuwono, Nuri Wiyono, Masduki Asbari, Dewiana Novitasari, Nelson Silitonga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen, Vol.5, No.3, 2020 Agustus, Hal 615-632) (Yuwono, Wiyono, Asbari, Novitasari, & Silitonga, 2020). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah berperan sebagai full-mediator. Penelitian ini mengusulkan sebuah model untuk membangun kinerja karyawan di antara karyawan wanita dari industri sepatu di Tangerang melalui peningkatan praktik kepemimpinan transformasional dengan kesiapan untuk berubah sebagai mediator. Penelitian ini dapat membuka jalan untuk meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. |
| 2. | Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan Dalam Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Di Tengah Pandemi COVID-19 (Aisyatin Kamila, Jurnal Konseling Pendidikan Islam, Vol.01, No.02, Juli 2020) (Kamila, 2020). | Penelitian ini membahas tentang peran perempuan sebagai garda terdepan bagi belajarnya anak, Mengingat sistem pembelajaran yang dilakukan ini adalah secara online karena wabah COVID 19, Maka peran ibu perlu di maksimalkan demi efektivitas belajar anak selama di rumah. Terlebih dalam meningkatkan motivasi belajar pada anak. Karena Motivasi dalam kaitannya dengan belajar adalah dorongan, keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan |

| | | |
|----|--|---|
| | | belajar, sehingga diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai. |
| 3. | Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga (Nikma Wahyuni Hanis, Atika Marzaman, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.8, No.2, Desember 2019) (Wahyuni & Marzaman, 2019). | Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan program PKK telah banyak memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Desa. Keberhasilan diperoleh berkat adanya dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan juga atas pembinaan langsung oleh pengurus PKK. Program PKK juga belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, dimana hambatan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas masyarakat khususnya perempuan serta masih minimnya penguasaan terhadap teknologi. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pemerintah dalam pengembangan dan maksimalisasi program PKK. |
| 4. | Pembelajaran Yang Diperoleh Dari COVID-19 Dan Harapan Ke Depan: PKPM Di Ranting Aisyiyah Laksana (Nurhilmiah, Masitah Pohan, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No.1, April 2020) (Nurhilmiah & Pohan, 2020). | Hasil penelitian ini yaitu mengenai pencapaian dari program kemitraan pengembangan Kemuhammadiyah ini yang munculnya kesadaran para anggota Aisyiyah Ranting Laksana yang dimulai dari meningkatnya wawasan dan kesadaran para pengurus dalam memetik pembelajaran dan memupuk harapan di tengah pandemic COVID19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya. Sehingga diharapkan ketika sudah tiba masanya Aisyiyah Ranting Laksana bisa aktif kembali mengadakan kegiatan berupa pengajian rutin, semua anggota mampu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. |
| 5. | Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan (Lilik Aslichati, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol.7, No.1, Maret 2011, Hal 1-7 (Aslichati, 2011). | Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK merupakan organisasi yang berpotensi sebagai sarana pemberdayaan dan pemberdayaan partisipasi setara perempuan dalam pembangunan secara efektif. Semua program kerja berorientasi kepada pemberdayaan perempuan, meski implementasinya masih berorientasi top down, belum bottom up seperti yang diharapkan. PKK |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>juga hanya mampu memberdayakan anggota perempuan saja, bukan berdampak pada pemberdayaan perempuan non-anggota. Meski demikian manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya program Posyandu untuk balita dan orang tua. Pelatihan yang terarah, terukur, dan intensif serta dukungan dari pemerintah daerah tetap dituntut untuk memberdayakan perempuan melalui PKK..</p> |
| 6. | <p>Pemberdayaan Kelompok Kerja (POKJA) Ibu Rumah Tangga Dalam Monitoring Kesehatan Warga Selama COVID-19 (Wawan Kurniawan, Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 1, No. 1, Agustus 2020) (Kurniawan, 2020)</p> | <p>Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan kelompok kerja ibu rumah tangga dalam monitoring kesehatan warga selama COVID-19, disalah satu RT 03 RW 14 perum BDB2 siukahati cibinong bogor , peran satgas COVID yang telah berjalan sangat efektif, program yang dijalankan dengan metode plan, do, check, action (PDCA). Dimana kelompok Pada tahap Plan ditentukan pelaksana kegiatan oleh kelompok kerja (pokja) ibu-ibu RT, pada tahap Do diterapkan proses monitoring dengan menyebarkan Form Isian Kesehatan Warga melalui group WA dan verifikasi melalui pemantauan langsung, pada tahap Check yaitu memeriksa data-data hasil kuesioner sangat penting untuk memastikan kesehatan warga dengan cara pengambilan data seluruhnya bukan data sampling dan tahap Act yaitu memberikan informasi tentang pola hidup sehat, memberikan support dan dukungan secara rohani, memberikan bantuan bahan makanan pokok bagi para pekerja lepas dan mengisolasi secara mandiri warga yang termasuk dalam ODP.</p> |
| 7. | <p>Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Dan Dampaknya (Studi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020) (Moh. Dliya'ul Chaq, Jurnal Penelitian dan kajian keislaman Vol. 8, No. 1, Juni 2020) (Chaq, 2020).</p> | <p>Penelitian ini menjelaskan bahwa MUI Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 bersifat cepat tanggap dan efektif upaya yang memainkan peran yang jelas dalam mengatasi bahaya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang ada yang dialami masyarakat di era pandemi COVID-19 begitu bahwa kehidupan manusia dan keberlangsungan agama tetap terjaga. Fatwa ini sesuai dengan logika teori menutup peluang terjadinya bahaya (sadd al-dzari'ah) yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia (hifdz al-nafs) dan</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | kelangsungan hidup manusia agama (hifdz al-din). Kedua, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berperan sebagai media perubahan sosial yang dibutuhkan selama era pandemi COVID-19. |
| 8. | Peran Organisasi Perempuan dalam Penguatan Social Capital Melawan Pandemi COVID-19 (Studi pada Gerakan Kampanye Sosial Persit Kartika Chandra Kirana XXXIX Kabupaten Pati Jawa Tengah) (Dewi Erowati, Kuncoro Bayu Prasetyo, Sri Astuty, Tutting Anggraeni, Indonesian Journal of Anthropology, Vol.5, No.1, Juli 2020) (Erowati, Prasetyo, Astuty, & Anggraeni) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa di saat modal ekonomi hancur, maka modal sosial dapat menjadi alternatif bagi ketahanan hidup masyarakat. Solidaritas dan saling membantu di antara warga masyarakat tanpa memperhitungkan keuntungan finansial yang juga merupakan salah satu karakteristik modal sosial sangat diperlukan pada situasi krisis pandemi COVID-19. Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIX Pati melalui berbagai aktivitas voluntary dan non-profitnya telah memperlihatkan diri sebagai salah satu aktor penggerak tumbuhnya modal sosial, terutama yang dibangun melalui jejaring yang dimilikinya secara struktural maupun secara non-struktural yaitu melalui Kodim sebagai bagian dari institusi Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah) maupun secara non-struktural dengan lembaga sosial lainnya seperti Women's Crisis Center dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). |
| 9 | Peran Perempuan Hindu dalam Situasi Pandemi COVID 19 (Diah Nirmala Dewi, Ni Wayan Yusi Armini, Anggy Paramitha Sari, Jurnal Filsafat, Vol.11, No.2, September 2020) (Dewi, Yusi Armini, & Sari, 2020). | Dalam penelitian ini menjelaskan peran perempuan juga bisa mengambil peran laki-laki dalam berbagai tatanan kehidupan. Perempuan bisa mencari nafkah layaknya seorang laki-laki, tetapi perempuan juga bisa bertanggung jawab atas kodratnya menjadi seorang wanita. Dari sudut pandang Hindu wanita Hindu menjalankan swadharma dengan berbagai perannya di keluarga dan masyarakat yang dapat membantu taraf hidup melalui pemanfaatan teknologi yang semakin maju. |
| 10. | Budaya Organisasi Dalam Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota | Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dalam implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal, dimana dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal sehingga dapat dikatakan budaya organisasi yang dimiliki masih lemah berpengaruh terhadap penurunan implementasi |

| | | |
|--|--|--|
| | Kendari), (Ronald, Sundi Komba, Rahman, publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.10 , No.2 Tahun 2019) (Ronald, Komba, Rahman, & Publica) | program/kegiatan, disebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan komitmen pemerintah serta seluruh pihak yang terkait belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dengan melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab disetiap unsur-unsur. Unsur-unsur budaya organisasi yang dimaksud adalah aspek-aspek budaya organisasi, nilai-nilai, dan asumsi dasar |
|--|--|--|

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan perempuan, kemudian persamaan penggunaan metode penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah mengenai fokus penelitian, dimana peneliti ini memfokuskan pada Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi DIY: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Dan Muslimat Nu, selain itu juga pada studi kasus atau lokasi penelitian dimana peneliti memilih Provinsi DIY.

F. Kerangka Teori

1. Organisasi Perempuan Islam dan Pemberdayaan Perempuan

a. Organisasi Perempuan Islam

James L.Gibson menjelaskan bahwa organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.

Organisasi-organisasi memiliki ciri khusus oleh perilaku yang di arahkan kearah pencapaian tujuan. Mereka mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Hal ini dilakukan melalui tindakan-tindakan individu serta kelompok secara terperinci. Organisasi perempuan berdasarkan identifikasi DAWN terdapat enam jenis dari mulai yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis dan agenda feminis khusus.

- 1) Organisasi perempuan tradisional, seringkali sudah lama berdiri, cenderung berkitik di sekitar peran gender tradisional, meski membuat prestasi penting dalam bidang pendidikan perempuan, Kesehatan, dan pelayanan-pelayanan terkait, dan mungkin mempunyai pendekatan “*patronase*”. Kekuatannya terletak pada akses mereka terhadap sumber daya dan pembuat keputusan, kendati mereka mungkin tidak selalu mengeksploitasi jalinan ini.
- 2) Organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai politik, organisasi semacam ini mungkin memiliki persoalan dalam menegaskan agendanya sendiri, yang bersumber dari kekhawatirannya dianggap memecah belah.
- 3) Organisasi yang berbasis pekerja termasuk serikat buruh dalam sektor formal dan organisasi wiraswasta perempuan miskin. Organisasi ini biasanya memusatkan perhatian kepada masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan serta tersediannya kredit, akan tetapi kemudian melangkah ke

agenda feminis yang lebih eksplisit seperti mengasuh anak, pelecehan seksual di tempat kerja dan sebagainya. DAWN berpendapat bahwa organisasi semacam ini cukup berhasil memberdayakan perempuan miskin dalam situasi kehidupan pribadinya.

- 4) Organisasi yang ada sejak Dsawarsa Perempuan PBB dilancarkan, yang muncul dari pendanaan proyek koperasi kredit, proyek peningkatan pendapatan dan inisiatif-inisiatif lainnya bagi perempuan miskin. Kebanyakan organisasi semacam ini mengalami kelemahan struktural dan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*).
- 5) Organisasi kelompok akar rumput, berkaitan dengan proyek khusus dan cenderung melihat isu-isu kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum dan persoalan politik dari perspektif feminis.
- 6) Organisasi penelitian dan sumberdaya, yang muncul dalam tahun terakhir ini. Organisasi semacam ini benar-benar memiliki kesempatan mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan memberi masukan kepada pemerintah dan lembaga donor pemberi dana Internasional. Yang utama, mereka berusaha keras melenyapkan jarak pada umumnya terjadi antara penelitian dan yang diteliti (Ahdiah, 2011).

b. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan masyarakat

terdiri dari dua konsep, yaitu “pemberdayaan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pemberdayaan merupakan usaha Bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yang biasanya terdiri dari beberapa sector yakni ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan social-budaya. Sementara itu, masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama, missal perumahan di daerah perkotaan atau kampung di pedesaan.
- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Menurut Anthony Bebbington dalam buku Pemberdayaan Masyarakat yang ditulis oleh Totok Mardikanto menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat memiliki potensi untuk berkembang, karena setiap manusia ataupun masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam individu masing-masing. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya atau tidak memiliki kemampuan. Pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk membangun daya atau kemampuan yang dimiliki tiap individu tersebut, dengan memberikan dorongan, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan Langkah-langkah yang nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses serta memfasilitasi berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat menjadi semakin bergantung pada berbagai program, melainkan untuk memandirikan masyarakat itu sendiri.

Edi Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat menyatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan yaitu:

- Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan hanya kebebasan berpendapat melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
- Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

- Mengikut sertakan diri mereka dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. (Mardikanto & Soebiato, 2013)

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan ialah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan (Hubeis). Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangannya upaya dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kasat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal. Seperti peningkatan dalam kondisi, derajat, dan kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sector strategis seperti di bidang Pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, Kesehatan, dan keikutsertaan ber-KB (Daulay, 2006).

Pengelola program dalam hal ini adalah perempuan dusun yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non-formal dapat disebut sebagai agen pemberdayaan (*agent of empowerment*). Pada RPJP Nasional dan RJPM Daerah menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu program prioritas dalam rangka pembangunan Nasional. Keadaan demikian dapat meningkatkan kedudukan

dan peranan perempuan, serta mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hal lain yang diperoleh yakni meningkatnya kualitas peran dan kemandirian perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, memberdayakan perempuan sama halnya dengan memberdayakan suatu bangsa.

“Program pemberdayaan perempuan yang ada di dusun biasanya berupa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal dusun yang tanpa mengesampingkan proses pendampingan dalam proses pelatihan. Pelatihan merupakan peran yang edukatif yang begitu spesifik, karena hal tersebut melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan sesuatu. Pelatihan juga berperan dalam meningkatkan ketrampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat tentunya tidak semata-mata hanya itu saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan. Pelatihan akan berlanjut efektif apabila terdapat pendampingan dalam pelaksanaan. Diperlukan adanya pendampingan yaitu agen pemberdayaan yang tugasnya adalah mengawasi, mengamati dan memberikan fasilitas sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat yang ada di lapangan (J. Ife dan Tesoriero, 2008).

Pendekatan pembangunan selama ini belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan juga laki-laki sehingga turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (Perempuan, 2001). Hal itulah yang mengakibatkan berbagai bidang masih senantiasa diperlukan upaya dalam pemberdayaan perempuan, sehingga dapat terwujud kesetaraan akses partisipasi, manfaat, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat. Di sisi lain saat ini masih banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum peka akan gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, pendapat, dan kepentingan baik laki-laki maupun perempuan, serta belum menetapkan kesetaraan dan juga keadilan gender sebagai sasaran di akhir dari pembangunan (Gie, 2001). Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, maka diperlukan kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan haruslah peka gender. Pemerintah melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 menjelaskan bahwa agar setiap daerah mengembangkan kebijakan-kebijakan, program ataupun kegiatan pembangunan yang responsive gender. Sara H. Longwee mengembangkan teknik analisis gender yang dikenal dengan istilah “Kerangka Pemampuan Perempuan”. Metode yang digunakan Sara H.Longwee ini mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, tentang bagaimana menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik

perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender (Muttalib, 1993).

Pemberdayaan perempuan mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:

- 1) *Capacity building* yang bermakna membangun kemampuan perempuan
- 2) *Cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan
- 3) *Structural adjustment* adalah penyesuaian structural yang memihak perempuan

Upaya pemberdayaan diarahkan pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan gender. Kriteria analisis yang digunakan dalam metode ini terdiri dari:

- 1) Kejahteraan
- 2) Akses
- 3) Penyadaran
- 4) Partisipasi
- 5) Kontrol

Dimensi kesejahteraan secara sederhana dapat diukur dengan tercapainya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Dimensi akses dan kontrol terhadap sumber daya mengarah pada sejauh mana laki-laki dan perempuan berpeluang dan mampu mengambil keputusan atas sumberdaya produksi, sejauh mana laki-laki dan perempuan memiliki akses control atas sumberdaya seperti

tanah, tenaga kerja, kredit, informasi dan ketrampilan. Adanya kesenjangan diantara perempuan dan laki-laki dalam sumberdaya mengakibatkan produktivitas perempuan dan laki-laki berbeda.

Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis ditekankan pada perlunya upaya penyadaran kritis bahwa kesenjangan gender terjadi karena faktor sosial budaya dan sifatnya bisa diubah. Kesenjangan terjadi karena adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penyadaran berarti penumbuhan sikap kritis. Dimensi berikutnya ialah partisipasi. Dalam hal pembangunan, kesenjangan gender dalam partisipasi ditunjukkan oleh tidak terwakilinya kelas bawah dalam lembaga-lembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan diarahkan pada upaya pengorganisasian perempuan sehingga berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka terwakili. Dimensi selanjutnya adalah kontrol, yang melihat bahwa kesenjangan gender pada alokasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di segala bidang. Siapa menguasai alat-alat kerja, tenaga kerja, pembentukan modal, dan lainnya. Pemberdayaan diarahkan pada alokasi kekuasaan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

d. Organisasi Perempuan Islam dan Pemberdayaan Perempuan

Menurut (Eka Rahmawati 2015) organisasi perempuan Islam dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu gerakan perempuan yang menuntut keadilan atau hak mereka sebagai warga negara dan dalam berpolitik, hak untuk dipilih maupun hak memilih. Dalam pemberdayaan perempuan sering dikatakan

usaha dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat banyak (Dian Eka Rahmawati, Muhajir Darwin, and Munawar Ahmad 2018). Pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan, agar ada persamaan derajat antara perempuan dengan laki-laki, tanpa adanya partisipasi dukungan dari organisasi perempuan, pemerintah tidak akan mampu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena organisasi perempuanlah yang berada di garda terdepan dalam mensosialisasikan dan memberikan sinergi dalam program pemerintah (Saptandari 1999). Menurut (Septi 2003) dalam bidang peranan perempuan di ranah publik masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Walaupun sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh perempuan di ranah publik, namun eksistensinya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Di sinilah pentingnya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada kaum perempuan. Hampir semua ormas menyatakan bahwa perempuan perlu diberi ruang gerak yang luas untuk terlibat langsung dalam kegiatan di wilayah publik.

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sementara pemberdayaan juga dimaknai sebagai proses kepada

masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan yaitu, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Selain itu ada juga yang mengemukakan tentang langkah dalam melakukan pemberdayaan seperti Riant Nugroho (2008) yaitu perlu adanya tiga langkah yang berkesinambungan, diantaranya:

- 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. Dalam hal ini, tolak ukur yang digunakan adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan mmotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan atau input serta pembukaan

akses ke dalam berbagai peluang atau kesempatan yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

- 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepa yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak beraryi mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan menimbulkan yang kecil yang melupakan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan msyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU dalam konteksnya terhadap pembangunan sosial masyarakat.

Menurut (Saptandari 2018) peran organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting yaitu:

- 1) Menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Menyuarakan dan memperjuangkan hak hak perempuan dengan sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan.

- 2) Mampu menangani permasalahan yang ada dimasyarakat

Perempuan juga berpartisipasi pada lingkungan sekitar agar dapat menimbulkan keadilan pada masyarakat dan dapat melihat keadaan sekitar dengan baik sehingga bisa menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, menangani masalah yang ada dimasyarakat suatu kebanggaan pada kaum perempuan, sehingga organisasi perempuan lebih dulu melihat permasalahannya seperti apa setelah itu memecahkan masalah.

Adanya Covid-19 mengharuskan berbagai elemen organisasi dan tokoh-tokoh public ikut dalam penanganan Covid-19 terutama dampak Covid-19 sendiri membuat kerugian pada negara maupun masyarakat terutama peran organisasi dalam pemberdayaan perempuan pada masa pandemi dengan meningkatkan

penguatan ekonomi, di saat ekonomi hancur, disitu juga harus mampu dapat menguatkan ekonomi maka itu modal sosial dapat menjadi alternatif bagi ketahanan hidup masyarakat. Solidaritas dan saling membantu tanpa memperhitungkan keuntungan finansial yang juga merupakan salah satu karakteristik modal sosial sangat diperlukan pada situasi krisis pandemi Covid-19 (Erowati and Kuncoro Bayu Prasetyo 2020).

Menurut (Saptandari 1999) Ada lima tingkat penguatan di dalam kerangka organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan dimasa pandemi:

1) Penguatan ekonomi

Pada dasarnya kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak punya asset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan kemampuannya di dalam perekonomian, atau bisa dikatakan tidak sejahtera, maka tentu tidak mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya. Maka itu perlu adanya penguatan ekonomi agar mampu meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.

2) Penguatan Jaringan

Meningkatkan kemampuan mereka masuk ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya dengan kaum lakilaki. Kalau jaringan itu sudah diperoleh, maka langkah yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran.

3) Penguatan kesadaran

Kalau kesadaran itu muncul, maka diharapkan mereka itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari gender perempuan tersebut. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat yang berikutnya adalah peningkatan partisipasi aktif.

4) Penguatan partisipasi

Perempuan tidak lagi dianggap sebagai sasaran atau objek dari pembangunan, tetapi ikut serta melakukan perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-program yang diberikan padanya.

5) Penguatan penguasaan

Partisipasi perempuan pada tingkat keputusan ini tentunya akan memberikan dampak pada pemberdayaan dan apabila partisipasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-sumber ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin penguatan terhadap akses sumber dan pembagian manfaat. Tetapi sering kali perempuan masalah dalam ketidakmampuan mengambil keputusan.

G. Definisi Konseptual

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan penyediaan.

2. Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan ialah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan (Hubeis). Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1978.

H. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Aisyiyah dan Muslimat NU akan dilihat dari aspek metode yang digunakan Sara H.Longwee ini mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, tentang bagaimana menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam upaya memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender (Muttalib, 1993). Pemberdayaan perempuan mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:

- a. *Capacity building* yang bermakna membangun kemampuan perempuan
- b. *Cultural change* yaitu perubahan budaya yang memihak kepada perempuan
- c. *Structural adjustment* adalah penyesuaian structural yang memihak perempuan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis, atau lisan dan juga perilaku dari orang yang dapat diamati (Moleong 2006). Didalam penelitian kualitatif juga menekankan bahwa peneliti harus memiliki kedekatan dengan orang-orang dan juga situasi yang diteliti, agar peneliti mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana realitas dan kondisi nyata yang ada (Sugiyono 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus karena unit analisis dari penelitian ini adalah kasus itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat dari keadaan maupun hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya dan juga pendekatan kualitatif ini lebih banyak berhubungan dengan keadaan yang ada di kehidupan sehari-hari, dimana pendekatan ini lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Itulah yang menyebabkan mengapa urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan bagaimana kondisi serta banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Metode ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian penulis, dimana penulis mendeskripsikan mengenai Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi DIY: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU.

2. Jenis Data

a. Data primer

Jenis data ini akan diperoleh secara langsung tanpa diwakilkan, menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara ini dapat memberikan pengetahuan dan fakta yang ada dilapangan bagaimana peran aisyiyah dan muslimat nu membantu masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui jurnal, web, buku untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai studi-studi sebelumnya tentang suatu hal mengenai Covid-19 di DIY.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dari beberapa sumber seperti jurnal, buku, web resmi, artikel dan berbagai info Covid-19 di DIY, dengan dokumen yang dibutuhkan berupa data tentang Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi DIY: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Dan Muslimat NU, tentang masyarakat di DIY, dan bagaimana provinsi DIY bisa mengurangi adanya Covid-19.

b. Wawancara

Metode wawancara mempermudah peneliti dalam mencari data langsung dengan tatap muka secara lisan untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan responden. Dalam penelitian ini responden yang akan di wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Siti Zulaihah (Ketua Pimpinan Aisyiyah Yogyakarta periode 2015-2022)
- 2) Hj.Luthvia Dewi Malik S.Ag (Ketua PW Muslimat NU DIY)
- 3) Fatma Amalia (Sekretaris PW Muslimat NU DIY)
- 4) Ria (SatGas Covid Aisyiyah Muhammadiyah DIY)

c. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menguraikan dan menyusun secara sistematis dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dan sumber data lainnya sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan mengenai Organisasi Perempuan Islam Dan Pemberdayaan Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi DIY: Studi Pada Organisasi Aisyiyah Muhammadiyah Dan Muslimat NU.

Menurut (Ivanovich Agusta 2014) Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, meliputi :

- 1) Pengumpulan Data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian.
- 2) Reduksi Data yaitu pengumpulan kasar data-data yang ada dilapangan, reduksi data dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan.
- 3) Penyajian Data yaitu penyajian yang telah menggambarkan keadaan secara singkat dengan data yang telah diringkas dan disajikan didalam laporan yang telah disusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

Menarik kesimpulan penelitian data yang telah diperoleh dan yang telah direduksi untuk kemudian dibuat dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan juga memilih data yang mengarah pada permasalahan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan kesimpulan yang valid.